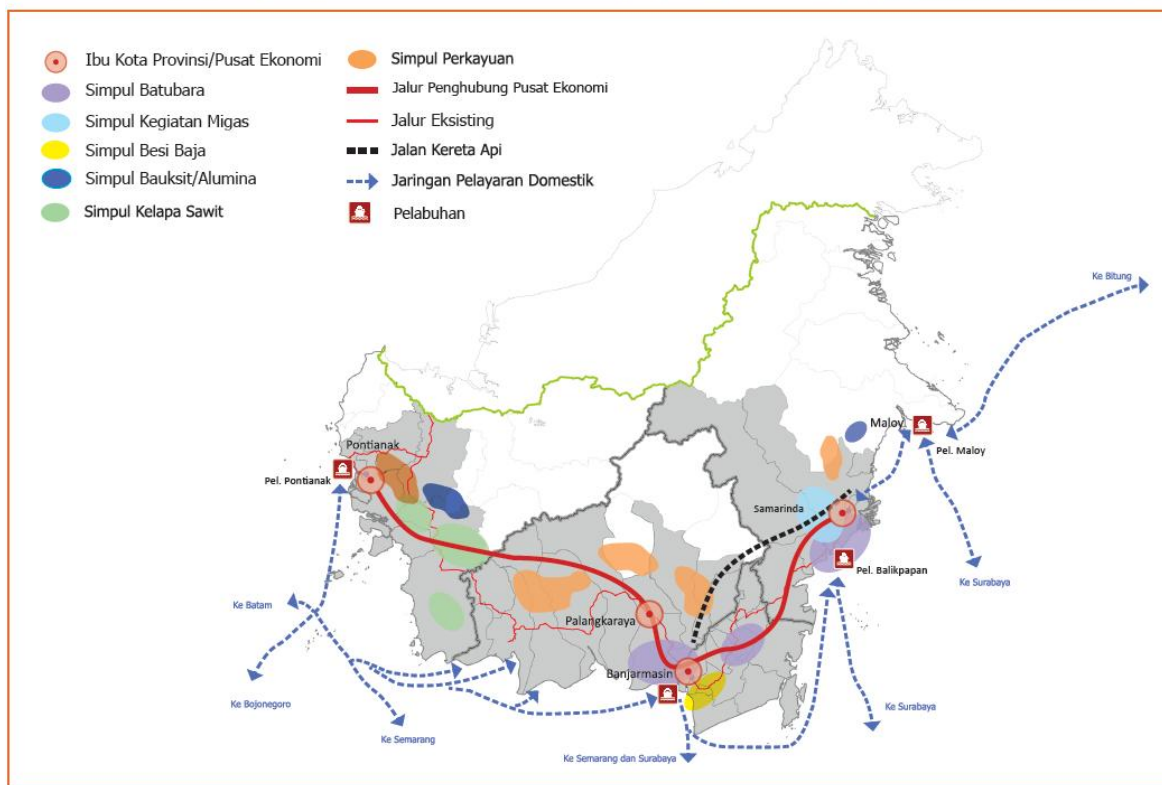


<h2>Koridor Ekonomi Kalimantan</h2>	<p>Tema Pembangunan:</p> <p><i>Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional</i></p>	<p>Terdiri dari 4 Pusat Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pontianak • Palangkaraya • Banjarmasin • Samarinda 	<p>Kegiatan Ekonomi Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minyak dan Gas • Batubara • Kelapa Sawit • Besi Baja • Bauksit • Perakayuan
-------------------------------------	---	---	--



D. Koridor Ekonomi Kalimantan

1. Overview Koridor Ekonomi Kalimantan

Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Koridor Ekonomi Kalimantan menjadi dasar penguatan tema pembangunan ekonomi Koridor ini sebagai **“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”**. Dasar penguatan pembangunan ekonomi seiring dengan rencana investasi *fast track* MP3EI yang didominasi oleh Kegiatan Ekonomi Utama berupa ekstraksi Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, dan Perakayuan. Penguatan pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Kalimantan telah mengambil konsep pemerataan dan penyeteraan sehingga sebaran pusat ekonomi merata di seluruh wilayah Kalimantan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

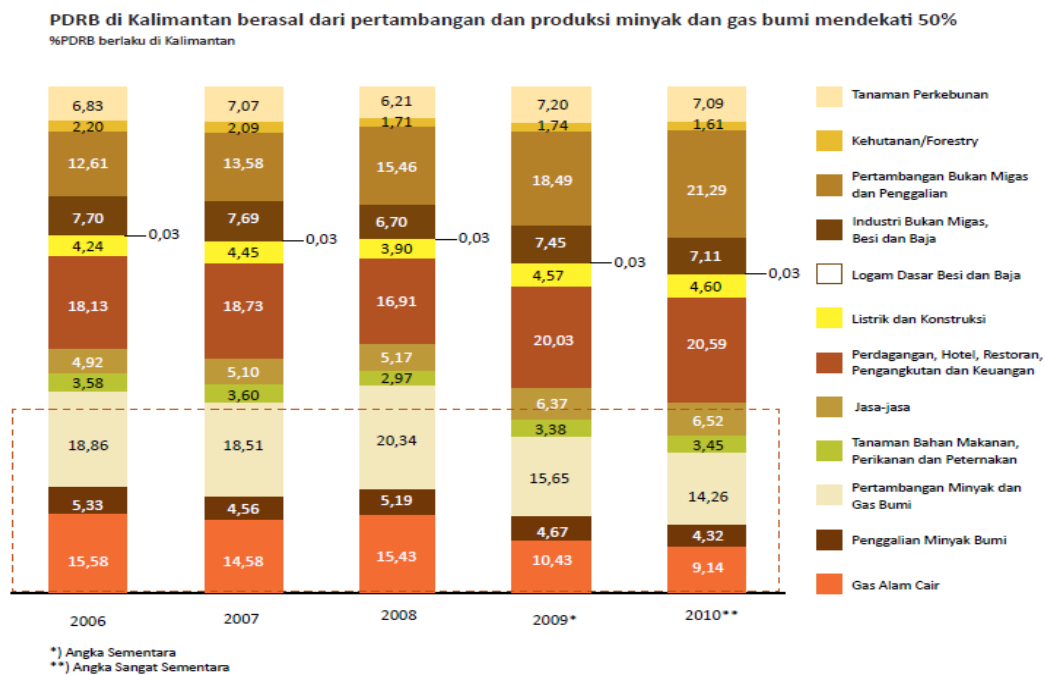
- 139 -

Pengenalan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) menjadi dasar penguatan pembangunan ekonomi yang tidak hanya merata, melainkan berkesinambungan dengan menerapkan skema pembangunan yang efektif dan efisien.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor migas (pertambangan dan manufaktur migas) masih memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Kalimantan, meski kontribusi sektor migas mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Hal yang berbeda terjadi pada sektor pertambangan non migas (pertambangan bukan migas dan penggalian) mengalami tren peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan. Implementasi pembangunan kedepannya perlu mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertambangan, baik migas maupun non-migas. Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan pengembangan perekonomian yang dihadapi oleh Koridor Ekonomi Kalimantan, antara lain:

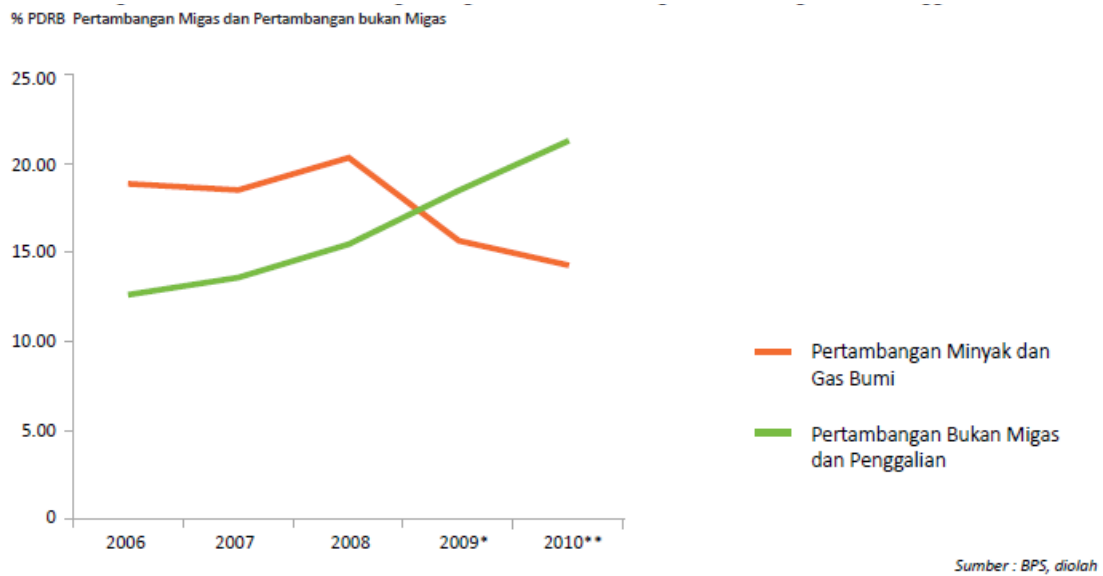
- a. Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke tahun, sehingga perlu pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya guna mengimbangi penurunan kinerja sektor migas, sehingga perekonomian Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya;
- b. Masih minimnya teknologi pengolahan mineral dan batubara sehingga menghambat pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk pertambangan non-migas;
- c. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara wilayah penghasil migas dengan non-penghasil migas maupun antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
- d. Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih, dan lain-lain, serta non-fisik (sosial), seperti pendidikan dan layanan kesehatan;
- e. Realisasi investasi pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan sejauh ini masih tergolong rendah;
- f. Masih banyaknya kebijakan dan regulasi yang menghambat investasi baru sehingga banyak menghambat pengembangan ekonomi Kalimantan.

Gambar 3.D.1
Share PDRB di Kalimantan



Grafik di atas menunjukkan bahwa penurunan pada kontribusi sektor migas dari tahun ke tahun merupakan indikasi bahwa sektor migas tidak dapat terus diandalkan untuk percepatan dan pembangunan perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan, sehingga perlu mendorong pengembangan sektor potensial lainnya seperti sektor pertambangan non migas, penggalian dan logam dasar besi dan baja. Pada tahun 2006-2007 dan 2008-2009 hampir seluruh sektor PDRB di Kalimantan mengalami penurunan cukup signifikan. Namun, kontribusi sektor pertambangan bukan migas mengalami tren kenaikan kontribusi pada di PDRB Koridor Ekonomi Kalimantan. Artinya, kontribusi sektor pertambangan bukan migas terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat dua sektor lain yang terus meningkat dengan tingkat perubahan relatif stabil dibandingkan lainnya, yaitu sektor kehutanan dan sektor logam dasar besi & baja.

Gambar 3.D.2
Perbandingan *Share* PDRB Pertambangan Migas dan
Pertambangan Bukan Migas dan Penggalian



Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI), telah diidentifikasi enam Kegiatan Ekonomi Utama sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan, yaitu Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, dan Perakayuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Daya Dukung Wilayah

Air. Status daya dukung air baik permukaan maupun air tanah menunjukkan nilai surplus terhadap potensi air di sejumlah DAS yang tersebar di Pulau Kalimantan. Ketersediaan air di Kalimantan sebesar 140 km³/tahun dan kebutuhannya 12 km³/tahun. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Energi. Sumber cadangan minyak dan gas terdapat di Kalimantan Timur dengan cadangan minyak sebesar 669,24 MMSTB dan gas sebesar 17,36 TSCF. Selain itu cadangan batubara yang dimiliki Kalimantan sebesar 55.363 juta Ton. Koridor Ekonomi Kalimantan juga memiliki sumber energi terbarukan yang cukup besar potensinya terutama untuk energi panas bumi yang terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dengan kapasitas sebesar 115 MW. Selain itu, potensi tenaga air yang dimiliki Kalimantan sebesar 21.793 MW. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012).

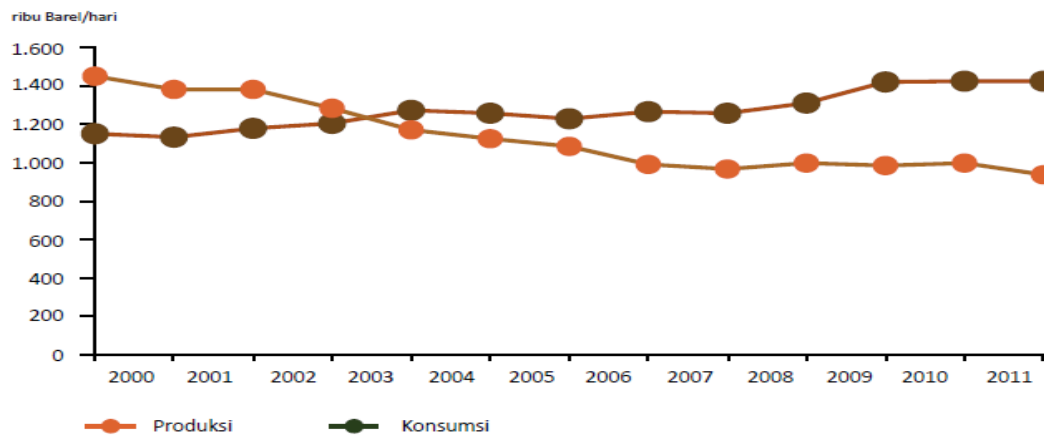
Kesehatan. Angka harapan hidup di Kalimantan Tengah dan Timur berada di atas rata-rata nasional yaitu 71,4 tahun. Namun sebaliknya untuk angka harapan hidup di Kalimantan Barat dan Selatan berada jauh dibawah rata-rata nasional. Selain itu, Kalimantan merupakan provinsi kedua tertinggi ditemukannya penyakit TBC di Indonesia. (Kementerian Kesehatan, 2011).

Lahan. Kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan lebat dimana 53 persen kewasannya merupakan kawasan hutan. Kalimantan merupakan habitat alami bagi beberapa jenis flora dan fauna seperti orangutan, gajah, badak, landak dan lain sebagainya serta merupakan habitat dari 3.000 spesies pohon. Namun dalam kurun waktu 9 tahun (2000-2009) luas hutan tanaman industri berkurang sebesar 1.324.274 Ha, pertambangan bertambah sebesar 88.615 Ha, pertanian bertambah sebesar 195.579 Ha dan lahan perkebunan bertambah sebesar 1.033.400 Ha. (Kementerian Kehutanan, 2011).

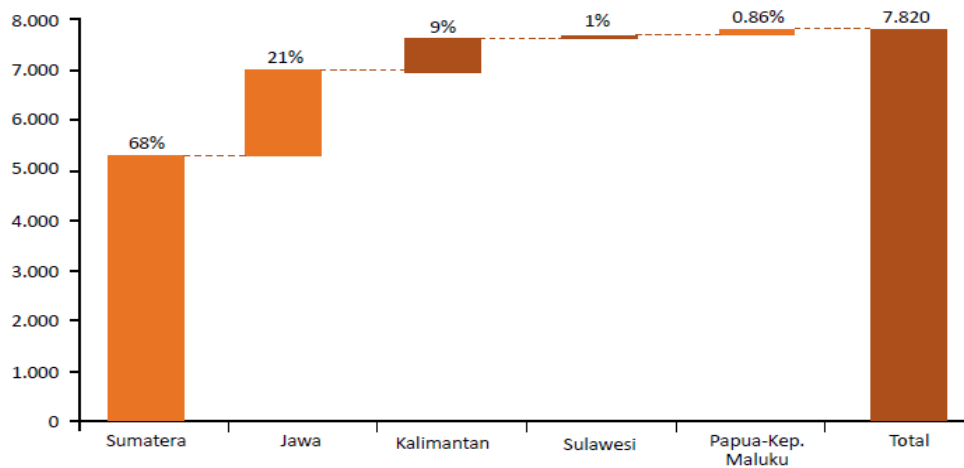
a. Minyak dan Gas

Sejak tahun 2002, kenaikan permintaan minyak dan gas (migas) untuk kebutuhan domestik membuat Indonesia bergantung pada impor migas. Menanggapi situasi tersebut, Indonesia perlu mengembangkan tiga lokasi cadangan terbesar minyak, dimana salah satunya terdapat di Koridor Ekonomi Kalimantan. Kondisi saat ini, sektor migas di Koridor Ekonomi Kalimantan mengalami penurunan produksi dari tahun ke tahun karena kurangnya pengembangan lapangan migas.

Gambar 3.D.3
Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia



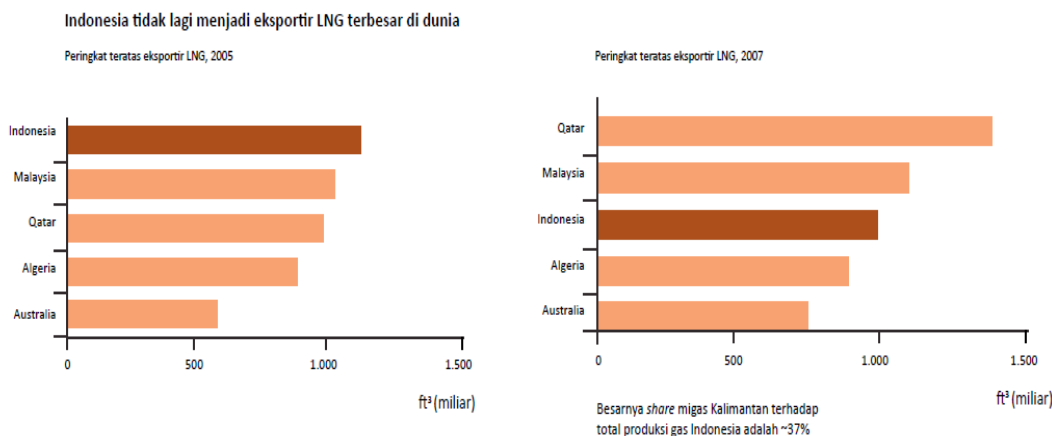
Gambar 3.D.4
Cadangan Minyak Bumi di Indonesia (MMSTB)



Sumber : Direktorat Jenderal Migas 2011, diolah)

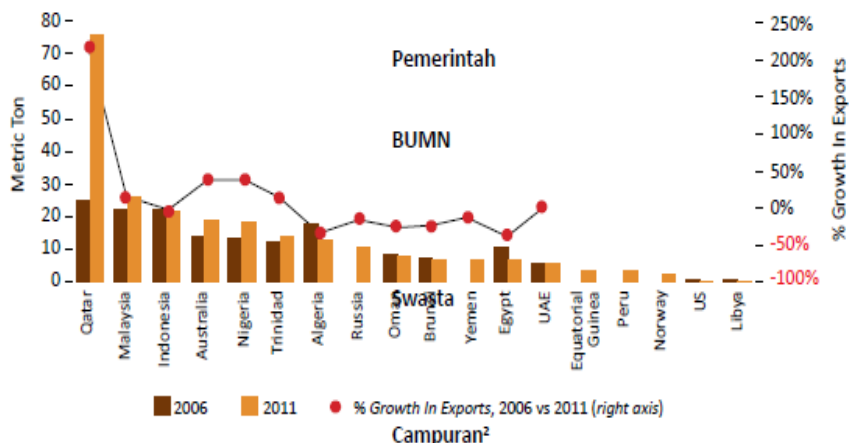
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM (2011) cadangan minyak bumi di Koridor Ekonomi Kalimantan hanya memiliki *share* sekitar 9 persen dari cadangan nasional. Data tersebut menempatkan Kalimantan berada di posisi ketiga setelah Sumatera dan Jawa dengan masing-masing *share* sebesar 68 persen dan 21 persen. Kemudian diikuti oleh Sulawesi dan Papua-Kep. Maluku dengan *share* masing-masing sebesar 1 persen dan 0,8 persen terhadap cadangan minyak nasional.

**Gambar 3.D.5
 Ekspor Gas**



Gambar 3.D.6

Ekspor LNG Berdasarkan Negara Tahun 2006 dan 2011

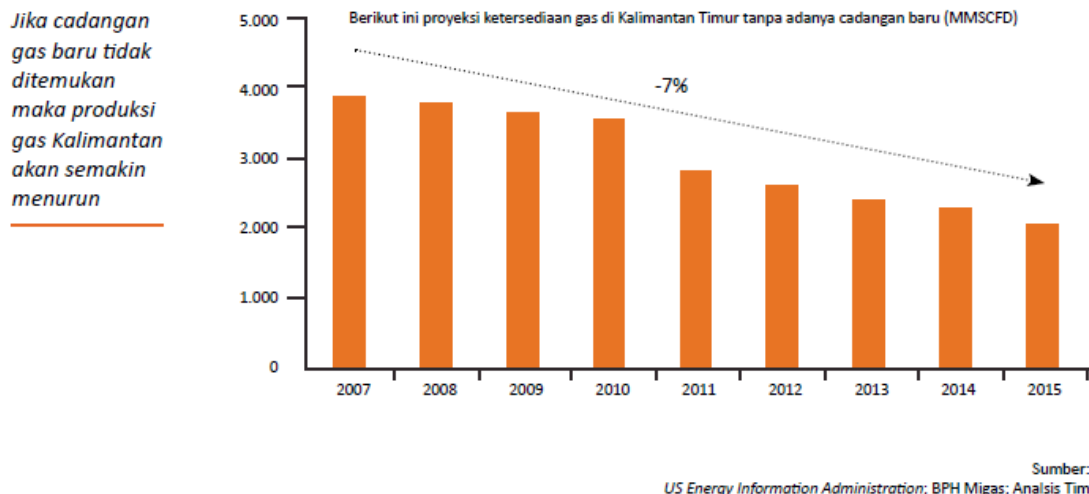


Sumber: Waterborne LNG Reports, UD DOE, PFC Energy

Berdasarkan data *US Energy Information Administration* tahun 2005, Indonesia dikenal sebagai negara pengeksportir gas alam cair (*Liquefied Natural Gas-LNG*) terbesar di dunia. Namun, tidak lagi demikian sejak tahun 2007 peringkat Indonesia sebagai negara pengeksportir LNG turun menjadi ranking ketiga setelah Qatar dan Malaysia. Data *Waterborne LNG Reports* tahun 2011 mempertegas bahwa ekspor LNG Indonesia menurun pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan ekspor LNG pada tahun 2006.

Gejala penurunan ekspor LNG diperkuat pada tren produksi LNG yang semakin menurun dari tahun ke tahun di Kalimantan Timur, sebagai produsen LNG terbesar di Indonesia. Dibandingkan cadangan gas dunia, cadangan gas Indonesia relatif kecil, hanya 1,7 persen terhadap total cadangan terbukti gas bumi dunia (6.534 triliun ft³). Cadangan gas dunia tersebar di Timur Tengah (41 persen cadangan dunia), disusul oleh wilayah Eropa dan Eurasia dengan pangsa sebesar 34 persen Afrika 8,3 persen Asia pasifik 7,9 persen. Sedangkan wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan mempunyai pangsa paling kecil, masing-masing sebesar 4,8 persen dan 4 persen (*BP Statistical Review of World Energy, 2009*). Apabila tidak dilakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan gas bumi baru, maka produksi LNG Indonesia secara total akan terus menurun. Teridentifikasi bahwa kontribusi produksi LNG di Kalimantan sekitar 37 persen dari total produksi LNG Indonesia.

Gambar 3.D.7
Proyeksi Cadangan Gas Kalimantan Timur



Untuk komoditas migas, strategi percepatan pertumbuhan pembangunan difokuskan untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional menjadi 1 juta BPH pada 2025 (Kementerian ESDM, 2010). Saat ini, realisasi rata-rata *lifting* Desember 2010 – Februari 2011 hanya sekitar 893 ribu BPH. Tersendatnya produksi nasional ini salah satunya disebabkan karena menurunnya tingkat *lifting* minyak bumi secara alamiah (penurunan sekitar 12 persen per tahun) di dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Kegiatan eksplorasi migas di Kalimantan pada masa yang akan datang diperkirakan akan mengarah pada wilayah-wilayah yang kondisi medannya lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, seperti eksplorasi di laut dalam. Selain metode eksplorasi migas secara konvensional, peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah peningkatan kapasitas Metana Batubara (MBB) sebagai salah satu pendongkrak tingkat produksi gas nasional yang belum optimal. Sebagai contoh, optimalisasi kapasitas produksi MBB di Bontang – Kalimantan Timur masih tersendat karena memerlukan investasi tambahan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi MBB. Peningkatan eksplorasi MBB di Kalimantan Timur dilakukan agar dapat mendukung optimalisasi kapasitas produksi pabrik pencairan LNG Bontang yang berkapasitas sebesar 3,7 MKKpH (Miliar ft³ per Hari). Saat ini pabrik tersebut hanya beroperasi pada level produksi 2,55 mkkph pada 2009 dan 2,38 MKKpH pada 2010.

Kegiatan Ekonomi Utama Migas di Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat di KPI Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Rapak dan Ganal. Rencana investasi industri migas yang akan dilakukan di Kalimantan berupa proyek-proyek utama seperti penambahan kapasitas produksi BBM di Balikpapan dan sekitarnya dan eksplorasi laut dalam di Rapak dan Ganal. Migas di Koridor Ekonomi Kalimantan perlu melibatkan berbagai pihak, seperti swasta, BUMN, maupun pemerintah.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk mengurangi inefisiensi serta meningkatkan daya tarik investasi bagi pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas di Koridor Ekonomi Kalimantan. Beberapa perbaikan regulasi dan kebijakan yang perlu dan telah dilakukan, antara lain:

- a) Menyiapkan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract – PSC*) yang lebih menarik bagi perusahaan migas, dimana daya tarik ditentukan dari biaya yang perlu dibayar dimuka untuk mendapatkan kontrak bagi hasil dan besar kecilnya peran Pemerintah dalam kontrak tersebut (semakin kecil biaya yang perlu dibayar di muka dan semakin kecil peran Pemerintah, maka kontrak bagi hasil akan semakin menarik);
- b) Perbaikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait dengan percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI;
- c) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- d) Perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu. Subtansi yang mengalami perubahan mengenai penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh);
- e) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan *unsolicited project*, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur secara “*business to business*” di dalam kawasan pengusahaannya;
- f) Perbaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait pengaturan mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) untuk mendorong investasi dan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010;
- g) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri. Substansi yang mengalami perbaikan terkait peraturan yang mengatur tentang Penerapan *Domestic Market Obligation (DMO)* untuk Migas dalam pengembangan industri;
- h) Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik bagi pelaku usaha (investor) untuk menghindari terjadinya *economic high cost* (pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, dan cukai ditambah dengan berbagai pungutan liar) dalam rantai pasokannya (*supply chain*).

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Upaya lainnya yang dapat dilakukan terkait dengan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas di Koridor Ekonomi Kalimantan ialah pembangunan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung distribusi dan logistik migas, seperti pengembangan pelabuhan di Kariangau dan pengembangan terminal- terminal transit.



- 148 -

3) SDM dan IPTEK

Dalam upaya optimalisasi penciptaan nilai tambah dan menggerakkan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas di Kalimantan diperlukan:

- a) Pemberian dukungan teknis melalui peningkatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia agar dapat menurunkan biaya eksplorasi terutama pada wilayah-wilayah dengan kondisi medan sulit, seperti eksplorasi di laut dalam;
- b) Upaya mendorong percepatan penerapan *Enhanced Oil Recovery (EOR)*, sebagai satu upaya dalam meningkatkan *upstream activity* (eksplorasi & produksi), dimana penggunaan teknologi EOR ini akan mengoptimalkan kapasitas konsesi dari sumur-sumur minyak tua (*brown fields*);
- c) Pengembangan teknologi yang mendukung transportasi, *refining*, dan *marketing* untuk peningkatan kapasitas *downstream* (hilir);
- d) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung sektor migas di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan.

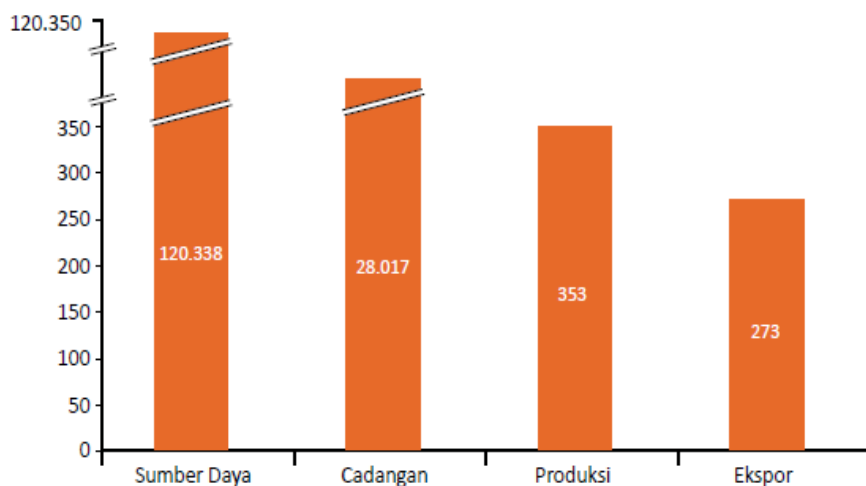
b. Batubara

Sektor pertambangan batubara diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama yang dapat menopang perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan di saat produktivitas sektor migas menurun. Pada tahun 2011, jumlah batubara yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 79 juta Ton (22 persen dari total produksi). Sektor kelistrikan merupakan pengguna batubara terbesar di dalam negeri sebesar 45 juta Ton di tahun 2011. Sementara sisanya sebesar 272 juta Ton telah diekspor ke beberapa negara. Adapun, negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia adalah Jepang, Taiwan, negara Asia lainnya, Eropa, Pasifik, dan lainnya.

Gambar 3.D.8
Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Indonesia memiliki banyak sumber daya dan cadangan batubara yang. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal

Profil Batubara Indonesia, 2011 (juta Ton)

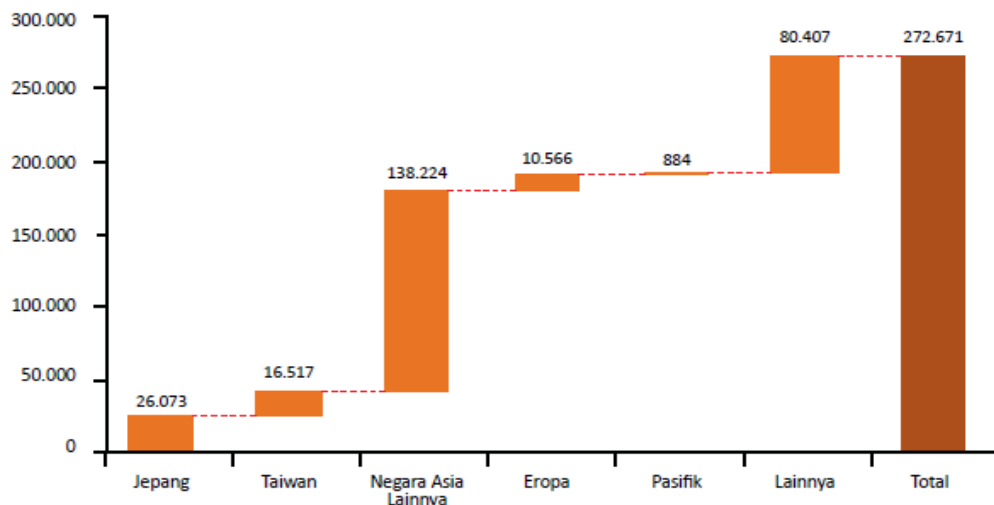


Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic Indonesia 2012, diolah

Gambar 3.D.9

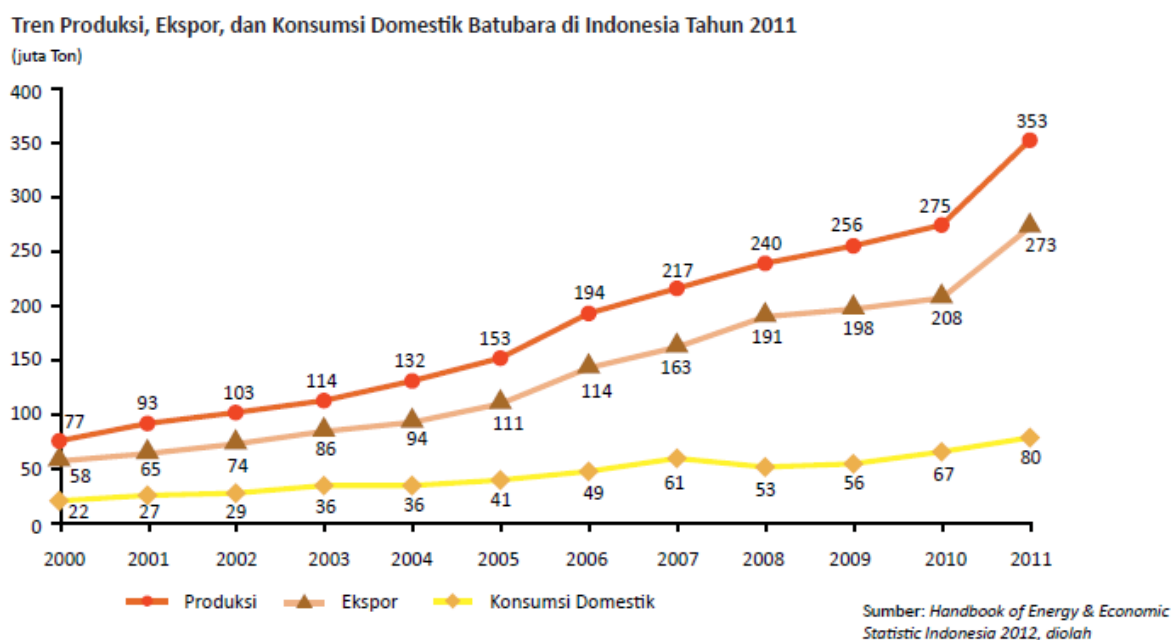
Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2011

Ekspor Batubara Indonesia, 2011 (ribu Ton)



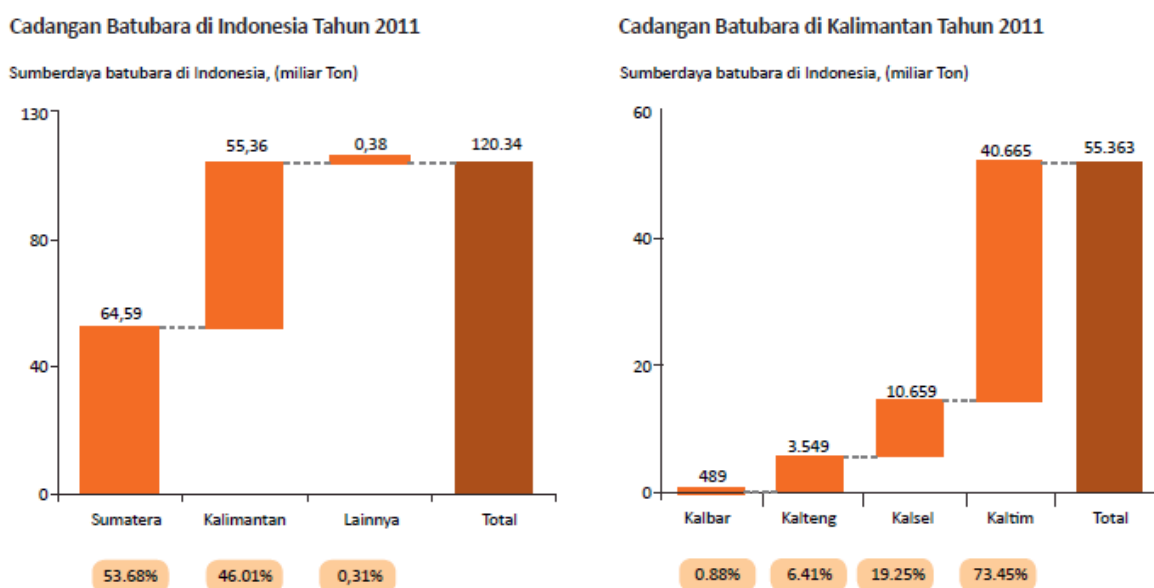
Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic Indonesia 2012, diolah

Gambar 3.D.10
 Pertumbuhan Produksi, Ekspor, dan Penjualan Batubara



Berdasarkan data tahun 2011, disamping Sumatera, porsi cadangan batubara di Kalimantan juga merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Hampir 50 persen cadangan batubara nasional terdapat di Kalimantan.

Gambar 3.D.11
 Sumber Daya Batubara

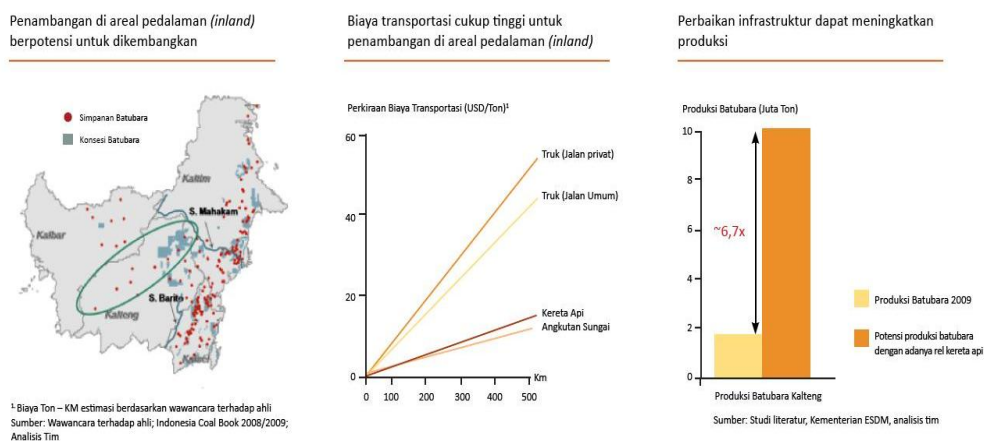


Kegiatan pertambangan batubara Koridor Ekonomi Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih dari 73,45 persen cadangan batubara Kalimantan terkonsentrasi di provinsi tersebut, kemudian diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 19,25 persen, Kalimantan Tengah 6,41 persen, dan Kalimantan Barat 0,88 persen.

Kegiatan industri batubara Koridor Ekonomi Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih dari 72 persen cadangan batubara Kalimantan terkonsentrasi di provinsi tersebut, kemudian diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 23,7 persen, Kalimantan Tengah 3,1 persen, dan Kalimantan Barat 1 persen.

Gambar 3.D.12

Penambangan Batubara di Areal Pedalaman Kalimantan



Sebagian besar cadangan batubara baru ditemukan di pedalaman Kalimantan. Namun kendala yang dihadapi untuk mengakses areal tambang batu bara yang baru adalah keterbatasan transportasi batubara yang ekonomis seperti jaringan kereta api atau angkutan sungai serta keterbatasan pembangkit listrik. Dampaknya ialah sebagian besar investor memilih untuk melakukan investasi sendiri, seperti pembangunan jalan privat milik perusahaan daripada menggunakan jalan umum yang tersedia guna memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut sehingga mengakibatkan tingginya nilai investasi untuk pertambangan batubara.

Menurut hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan data eksisting jumlah produksi batubara di Kalimantan Tengah tahun 2009, jumlah produksi batubara akan meningkat 6,7 kali jika dilakukan perbaikan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa perbaikan infrastruktur dapat memberikan nilai tambah bagi produksi batubara, khususnya di wilayah pedalaman.

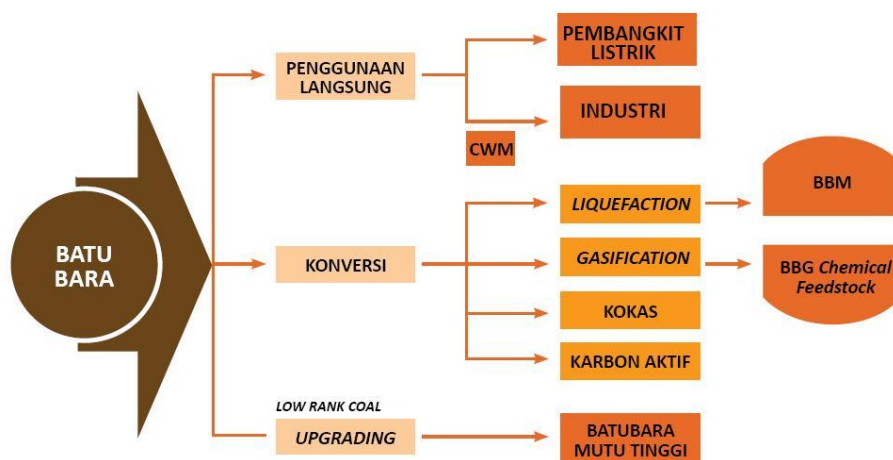
Permasalahan umum yang dihadapi oleh sektor pertambangan di Kalimantan adalah tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan wilayah hutan dan perkebunan. Tantangan pengembangan sektor batubara juga muncul dari lemahnya birokrasi perizinan berupa ketidakjelasan *time frame* atau SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam pengurusan izin. Untuk itu, reformasi birokrasi dan pelayanan prima dalam pemberian izin usaha pertambangan batubara harus segera terlaksana.

Strategi umum pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara adalah mendorong kegiatan ekstraksi cadangan besar batubara yang terletak di wilayah pedalaman Kalimantan, disertai penyiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan mineral sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk batubara perlu dikembangkan, antara lain investasi untuk konversi batubara seperti gasifikasi batubara yang dapat menghasilkan Bahan Bakar Gas (BBG) dan investasi untuk batubara cair. Selain mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga, *multiplier effect* yang diciptakan juga akan sangat besar, antara lain dari peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan juga dari penghematan substitusi impor.

Upaya peningkatan nilai tambah batubara ini memerlukan suatu insentif dari Pemerintah, mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi cukup tinggi. Salah satu insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah antara lain adalah insentif pajak dan mendorong pengembangan teknologi pengolahan batubara (eksplorasi dan produksi) yang ramah lingkungan.

Gambar 3.D.13
Rantai Nilai Batubara



Sumber: ITB dan Puslitbang ESDM dalam dokumen presentasi Perhapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Rencana investasi industri batubara Kalimantan akan fokus pada KPI Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong, Murung Raya, Barito, dan Balangan.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk dapat memberi kepastian usaha pengembangan kegiatan ekonomi utama batubara, beberapa penataan regulasi dan kebijakan yang perlu dan telah mengalami perbaikan sebagai berikut:

- a) Perbaikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait dengan percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI;
- b) Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan, serta penyelarasan antara Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c) Perbaikan regulasi terkait dengan administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang antara kawasan pertambangan batubara dan kawasan hutan (*clean and clear*);
- d) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum. Untuk percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum;
- e) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum;
- f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan ini merupakan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- g) Perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu. Substansi yang mengalami perubahan mengenai penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- h) Perbaiki Peraturan Pemerintah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perlunya pengaturan mengenai pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari perusahaan induk kepada anak perusahaan;
- i) Perbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Substansi yang mengalami perubahan terkait “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan;
- j) Perbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Substansi yang mengalami perubahan terkait “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
- k) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan *unsolicited project*, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur secara “*business to business*” di dalam kawasan pengusahaannya;
- l) Perbaiki Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.011/ 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait pengaturan mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) untuk mendorong investasi dan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;
- m) Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri. Substansi yang mengalami perbaikan terkait peraturan yang mengatur tentang penerapan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk Minyak, Batubara, dan Gas untuk pengembangan industri;
- n) Penyelesaian isu lingkungan mengenai masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

- o) Perbaiki birokrasi dalam proses perizinan guna simplifikasi SOP perizinan agar dapat memberi pelayanan prima dalam perijinan dan menjamin kontinuitas usaha (kepastian dalam hal *gaining profit and risk*);
- p) Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik bagi pelaku usaha (investor) untuk menghindari terjadinya *economic high cost* (pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, dan cukai ditambah dengan berbagai pungutan liar) dalam rantai pasokannya (*supply chain*).

Untuk dapat memberi kepastian usaha pengembangan kegiatan ekonomi utama batubara, perlu adanya penataan regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan, serta penyelarasan antara Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b) Perbaiki regulasi terkait dengan administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang antara kawasan pertambangan batubara dan kawasan hutan (*clean and clear*);
- c) Penyelesaian isu lingkungan mengenai masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan;
- d) Pemberian jaminan *supply*/pasokan bahan baku untuk industri dan energi kelistrikan dalam negeri melalui pemberlakuan *Domestic Market Obligation*;
- e) Perbaiki birokrasi dalam proses perijinan guna simplifikasi SOP perizinan agar dapat memberi pelayanan prima dalam perijinan dan menjamin kontinuitas usaha (kepastian dalam hal *gaining profit and risk*);
- f) Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik bagi pelaku usaha (investor) untuk menghindari terjadinya *economic high cost* (pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, dan cukai ditambah dengan berbagai pungutan liar) dalam rantai pasokannya (*supply chain*);
- g) Perumusan mekanisme insentif pajak bagi pelaku usaha yang melakukan investasi nilai tambah batubara (antara lain *coal upgrading* dan konversi batubara).

2) Konektivitas (infrastruktur)

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam menunjang pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Batubara, diidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi, yaitu:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- a) Pengembangan jaringan rel kereta api khusus batubara untuk menghubungkan antara lokasi pertambangan di pedalaman dengan pelabuhan dan atau pemanfaatan angkutan sungai agar kegiatan eksploitasi batubara di wilayah pedalaman menjadi layak secara ekonomis;
- b) Peningkatan dan penambahan kapasitas pelabuhan, baik pelabuhan sungai maupun pelabuhan laut sebagai akibat dari kenaikan produksi tambang batubara di wilayah pedalaman Kalimantan yang diproyeksikan akan terus meningkat dan secara khusus diperlukan pengembangan pelabuhan di sungai Barito dan Mahakam yang terhubung dengan jaringan rel kereta api;
- c) Perluasan pembangunan pelabuhan-pelabuhan khusus batubara, seperti pengembangan fasilitas pelabuhan tongkang dan pelabuhan tongkang;
- d) Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha pertambangan batubara yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e) Peningkatan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik untuk keperluan penambangan batubara.

3) SDM dan IPTEK

Dalam upaya optimalisasi penciptaan nilai tambah dan menggerakkan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama pertambangan Batubara di Kalimantan diperlukan:

- a) Upaya pengembangan teknologi pengolahan batubara (antara lain untuk gasifikasi dan batubara cair), serta teknologi eksplorasi dan produksi yang ramah lingkungan;
- b) Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), baik untuk tenaga manajerial maupun tenaga operasional;
- c) Memberikan bantuan SDM kepada SMK, yang meliputi tenaga administrasi dan pekerja terampil serta tenaga sub kontraktor (untuk jurusan teknik, keuangan, sosial, manajemen, K3L, dan admin);
- d) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung sektor Batubara di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- e) Pelatihan dalam penambangan serta pemanfaatan batubara antara lain meliputi teknologi *upgraded brown coal*, investarisasi potensi sumberdaya batubara, pengawasan produksi mineral dan batubara, teknologi batubara bersih, serta manajemen eksplorasi mineral dan batubara;

- f) Membuat program rancang bangun dan perekayasaan tungku *fluidized bed* sirkulasi pada pembakaran batubara kalori rendah dengan menggunakan kemajuan teknologi.

c. Kelapa Sawit

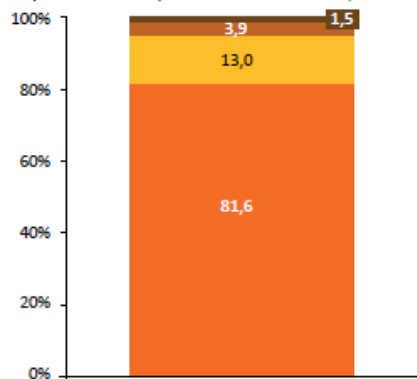
Hasil perkebunan di Kalimantan didominasi oleh produksi kelapa sawit dengan kontribusi mencapai 80 persen, jauh lebih besar dibandingkan hasil produksi perkebunan karet dan kelapa. Adapun, menurut data dari BPS (2008) diketahui bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 53 persen dari total luas areal perkebunan di Kalimantan.

Gambar 3.D.14

Produksi Perkebunan Kelapa Sawit

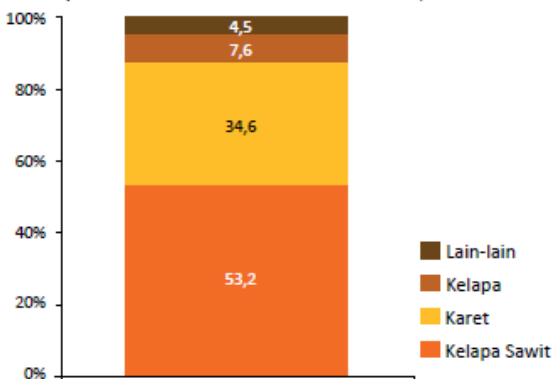
Kelapa Sawit menghasilkan > 80% dari total produksi perkebunan di Kalimantan...

% produk komoditi perkebunan di Kalimantan, 2008



...yang juga memanfaatkan areal perkebunan terbesar di Kalimantan

% areal perkebunan di Kalimantan berdasarkan komoditi, 2008



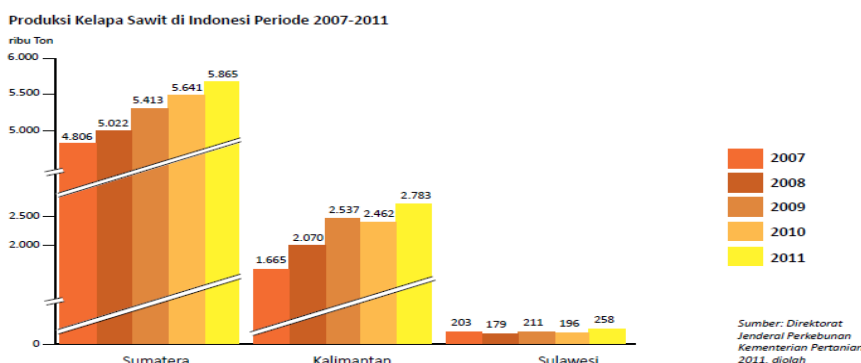
Sumber: BPS, Analisis Tim

Total luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 juta Ha) lebih besar daripada luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 2 juta Ha). Namun, jika ditinjau dari tingkat perkembangan areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 13 persen per tahun) tumbuh lebih pesat dibandingkan perkembangan areal kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 persen per tahun).

Gambar 3.D.15
Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit

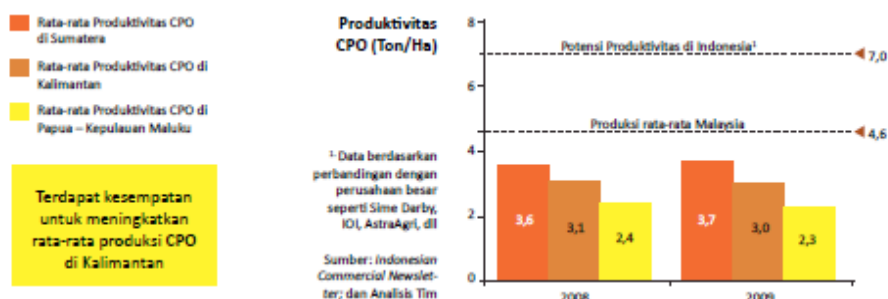


Gambar 3.D.16
Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

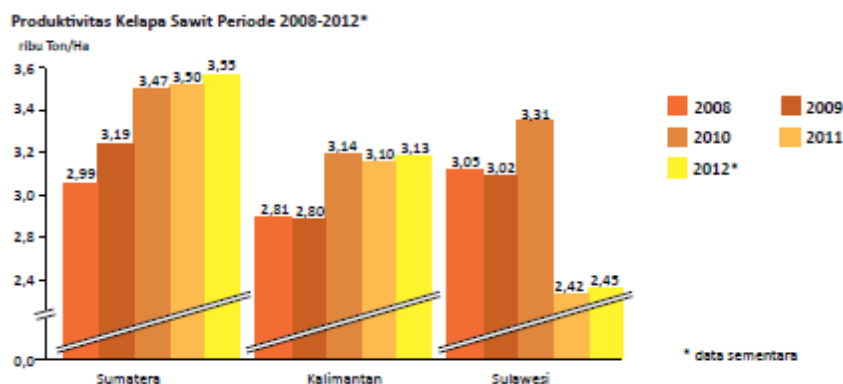


Namun yang perlu diperhatikan, peluang untuk melakukan ekspansi lahan perkebunan sawit di Koridor Ekonomi Kalimantan dapat dikatakan terbatas karena adanya pertimbangan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan intensifikasi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas produksi Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit.

Gambar 3.D.17
Produktivitas CPO



Gambar 3.D.18
Produktivitas CPO

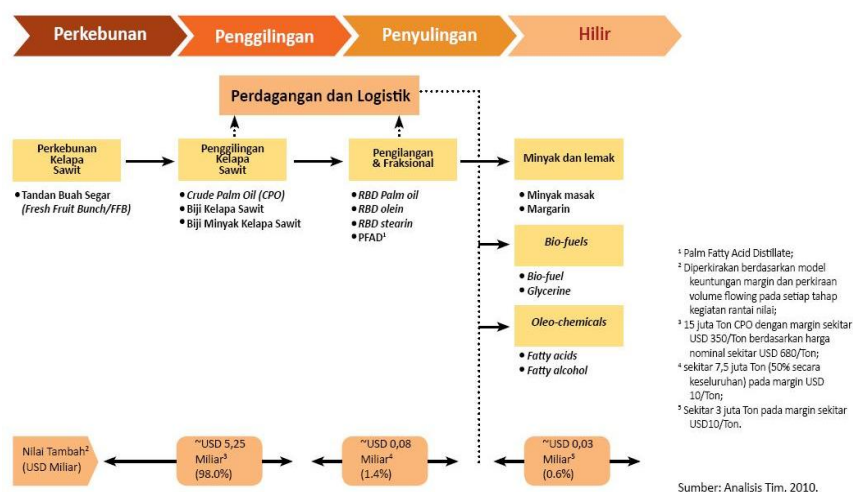


Produktivitas kelapa sawit di Kalimantan jumlahnya masih di bawah negara-negara lainnya yang merupakan negara *benchmark* produsen kelapa sawit. Produktivitas CPO Kalimantan berada di bawah rata-rata produktivitas Malaysia yang bisa mencapai 4,6 Ton/Ha. Potensi signifikan yang dimiliki oleh Kalimantan diharapkan mampu memberikan tambahan angka produksi kelapa sawit di Indonesia secara nasional.

Terdapat potensi peningkatan nilai yang signifikan dari pengembangan kelapa sawit, terutama dari pengembangan industri hulu melalui pengembangan lahan yang selektif, konversi lahan produktif, dan peningkatan produksi CPO.

Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai seperti di bawah ini:

Gambar 3.D.19
Rantai Nilai Kelapa Sawit





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Dalam kegiatan ekonomi utama kelapa sawit masalah utama yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya hilirisasi di dalam negeri, yang disebabkan karena belum terbangunnya iklim investasi yang mendukung dan menarik. Skema insentif perpajakan dinilai belum cukup menarik, dan pengenaan Bea Keluar (BK) CPO dinilai belum menggiring ke pengoptimalan potensi nilai tambah industri hilir kelapa sawit, dan pemanfaatan dana dari BK juga belum difokuskan bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung. Belum optimalnya kapasitas produksi kelapa sawit dalam negeri disebabkan oleh tiga hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan bibit kualitas tinggi dapat meningkatkan hasil produksi sampai 47 persen dari keadaan saat ini;
- 2) Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk;
- 3) Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (diatas 48 jam) membuat menurunnya produktivitas CPO yang dihasilkan.

Penggilingan: Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang kurang memadai dari perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Akses yang kurang memadai ini berdampak pada biaya transportasi yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area penggilingan ini merupakan salah satu hal utama demi menjamin peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu, kurangnya kapasitas pelabuhan laut dan tidak adanya tangki penimbunan mengakibatkan waktu tunggu yang lama di pelabuhan yang kemudian berimplikasi pada biaya transportasi yang tinggi.

Penyulingan: Kegiatan penyulingan adalah kegiatan yang akan mengubah CPO dari penggilingan menjadi produk akhir. Dengan berlebihnya kapasitas yang ada saat ini (50 persen utilisasi), rantai nilai penyulingan mempunyai margin yang rendah (USD 10/Ton) jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar USD 350/ton). Hal ini yang membuat kurang menariknya pembangunan rantai nilai tersebut bagi investor.

Hilir Kelapa Sawit: Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa sawit antara lain perkilangan, oleo kimia, dan biodiesel. Seperti halnya rantai nilai penyulingan, bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai kapasitas yang cukup. Hal ini membuat rendahnya *margin* dari rantai nilai tersebut. Namun demikian, pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis sebagai penghasil hulu sampai hilir, sehingga dapat menjual produk yang bernilai tambah tinggi dengan harga bersaing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat di Kutai Timur, Paser dan Bulungan, Kalimantan Timur; Banjar dan Kotabaru, Kalimantan Selatan; Barito, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Sanggau dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rencana investasi industri kelapa sawit yang akan dilakukan di Kalimantan, berupa proyek-proyek pengembangan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Terdapat juga pengembangan kapasitas pelabuhan di Kumai Kalimantan Tengah. Hampir semua kegiatan investasi kelapa sawit Koridor Ekonomi Kalimantan dilakukan oleh pihak swasta walaupun masih ada beberapa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.

1) Regulasi dan Kebijakan

Dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Kalimantan, diperlukan dukungan kebijakan dan penataan regulasi hal-hal berikut:

- a) Kebijakan Pemerintah untuk membantu pemilik lahan dalam meningkatkan hasil kelapa sawit mereka, dimana fokus kebijakannya adalah pemilik lahan skala kecil karena mereka menguasai mayoritas lahan tanam, namun produktivitas mereka jauh lebih kecil dibandingkan korporasi pemilik lahan skala besar;
- b) Kebijakan berupa inisiatif strategis untuk mendukung pemilik lahan kelapa sawit agar dapat meningkatkan produktivitasnya, melalui pembentukan Badan Kelapa Sawit, penyediaan dukungan finansial bagi pemilik lahan skala kecil, dan memperbaiki regulasi dan perencanaan;
- c) Kebijakan Pemerintah yang mendukung hilirisasi produk Kelapa Sawit sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja baru, termasuk mendayagunakan hasil sampingan industri pengolahan kelapa sawit menjadi barang/komoditi yang bernilai lebih. Salah satunya sudah mulai didukung dengan Perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d) Kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor produk mentah untuk mendukung peningkatan nilai tambah CPO;
- e) Kebijakan pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri sebelum di ekspor ke luar negeri;
- f) Rencana Pengembangan Maloy sebagai Kawan Ekonomi Khusus (KEK) pusat pengolahan hasil kelapa sawit yang sudah didukung oleh perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukung MP3EI;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- g) Percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI dalam yang telah didukung oleh perbaikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan;
- h) Dukungan regulasi berupa peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan Bea Keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (ex: industri *bio diesel*) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (*double taxation*) yang telah dilakukan dengan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu yang memperbaiki penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh);
- j) Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, diperbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- k) Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta memperlancar pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Dukungan infrastruktur (*enabler*) yang diperlukan untuk peningkatan konektivitas bagi pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit di Koridor Ekonomi Kalimantan meliputi:

- a) Ekspansi kapasitas dan perbaikan proses di dua pelabuhan utama kelapa sawit yang diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan produksi kelapa sawit;
- b) Perbaikan kapasitas pelabuhan kelapa sawit dan pengembangan kapasitas pelabuhan serta pengerukan alur pelayaran terkait di Koridor Ekonomi Kalimantan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- c) Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy yang merupakan kluster industri berbasis *Oleochemical* di Maloy Kutai Timur, terdiri dari pengembangan Pelabuhan Maloy dan jalan akses menuju pelabuhan Maloy. Pengembangan KIPI Maloy akan berdampak besar bagi pengembangan hasil olahan kelapa sawit karena KIPI Maloy dipersiapkan menjadi pusat pengolahan hasil kelapa sawit, yakni *crude palm oil (CPO)* dan produk turunannya, seperti minyak goreng, kosmetik, mentega, pakan ternak, es krim, sabun, tekstil, dan lainnya. Secara geografis, lokasi KIPI Maloy sangat strategis karena yaitu, terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju;
- d) Penanganan jalan akses yang dapat mendukung kelancaran distribusi hasil industri kelapa sawit berupa peningkatan kelas-kelas jalan di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- e) Perbaikan akses jalan di perkebunan, dimana waktu pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan menuju *miling* memakan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi produktivitas kelapa sawit secara signifikan.

3) SDM dan IPTEK

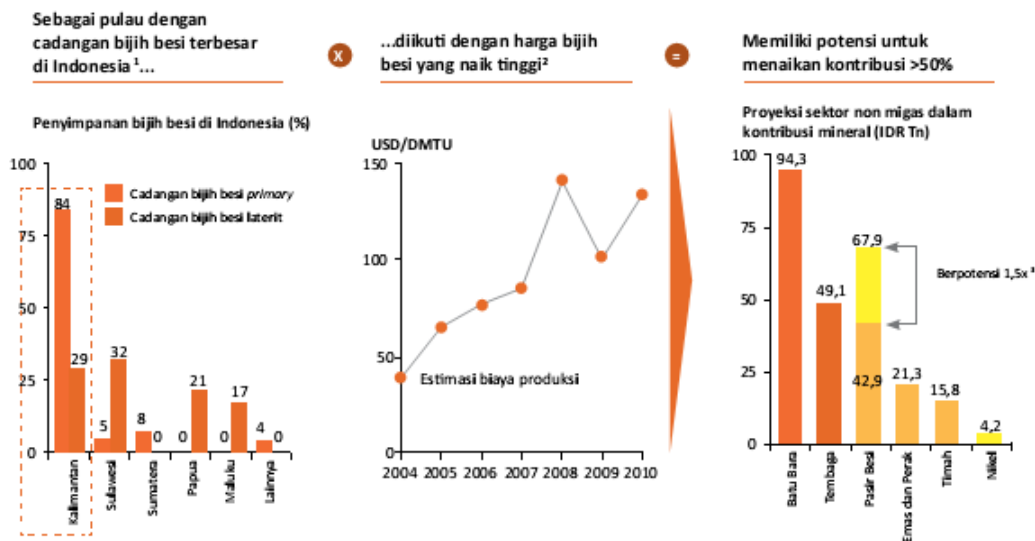
Salah satu dukungan yang diperlukan terkait sumber daya manusia dan teknologi untuk pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit di Kalimantan, adalah dengan menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan produksi kelapa sawit, seperti:

- a) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung sektor Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- b) Membuat program yang mendukung peningkatan kualitas dan perluasan *market* kelapa sawit, meliputi peningkatan mutu produk makanan, diklat teknis agribisnis kelapa sawit, serta pemasaran produk agribisnis untuk ekspor;
- c) Membangun *community college* untuk mempersiapkan SDM berkualitas di sektor kelapa sawit;
- d) Membuat program-program dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti pembuatan briket dari limbah sawit, teknologi pengolahan limbah cair industri kelapa sawit dengan reaktor *hybrid anaerob*, pemanfaatan ekstrak dan isolasi beta karoten dari minyak sawit mentah untuk suplemen pro, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai alternatif pupuk kalium, serta pemanfaatan *Crude Palm Oil Methyl Ester (CPOME)* sebagai bahan bakar pada mesin diesel.

d. Besi Baja

Besi baja adalah salah satu logam yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan daya saing dan pembangunan ekonomi bangsa. Industri besi baja memiliki *multiplier effect* yang besar karena keterkaitannya dengan industri-industri lain. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki cadangan bijih besi terbesar di Indonesia dan keberadaannya bagi industri besi baja Indonesia sangat penting. Sebesar 84 persen cadangan besi bajaprimer dan 29 persen cadangan bijih besi laterit Indonesia terdapat di Kalimantan. Tren pergerakan harga besi baja yang terus naik dan potensi kontribusinya terhadap perekonomian yang diperkirakan dapat naik dua kali lipat. Hal inilah yang mendorong pengembangan industri besi baja agar dapat berjalan secara optimal.

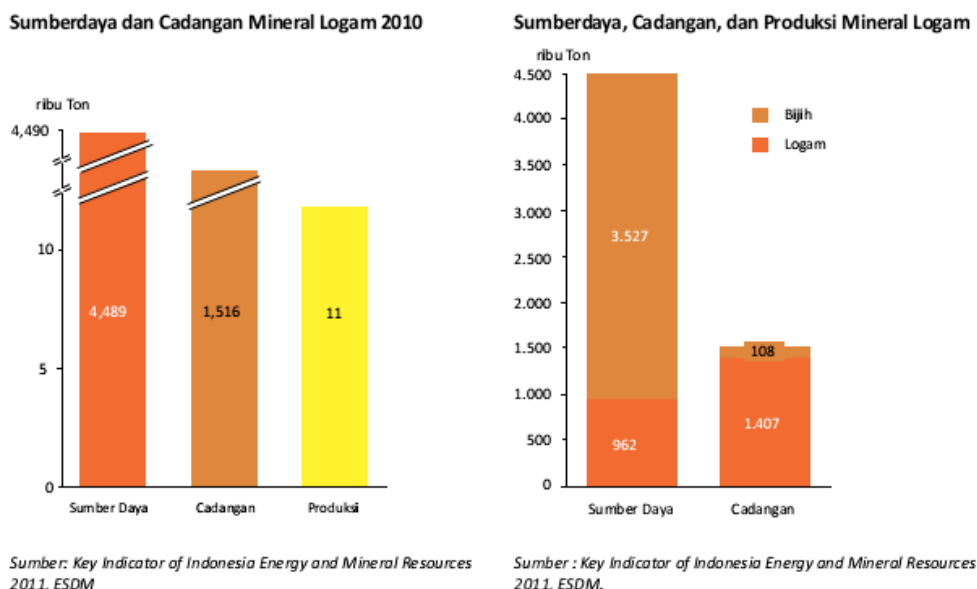
Gambar 3.D.20
Cadangan Bijih Besi



¹Indonesian Commercial Newsletter Vol. 57, June 2008. ²World Bank Commodity Price Data (Prk Sheet) ³Asumsi didasarkan bahwa cadangan sama selama 30 tahun dengan harga bijih besi USD 100 per Ton

Sumber: Indonesian Commercial Newsletter; World Bank Commodity Price Data; Analisis Tim

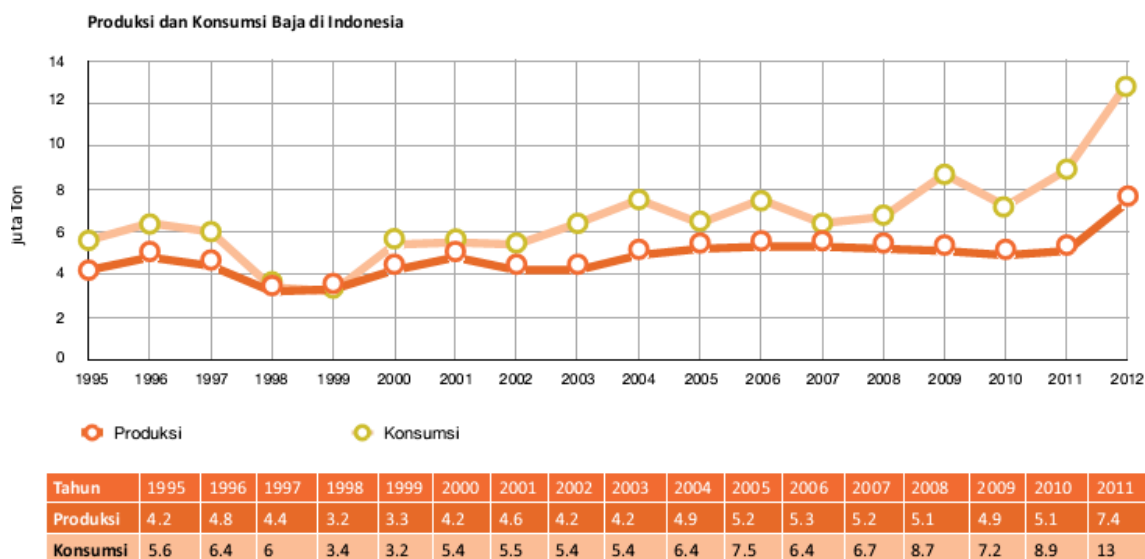
Gambar 3.D.21
Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam



Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja di Koridor Ekonomi Kalimantan, terdapat di Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) dan Kalimantan Selatan (Batulicin, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut). Pengembangan proyek di lokasi tersebut antara lain pengolahan dan pemurnian bijih besi serta pengembangan industri benefisi yang mengolah bijih besi dari tambang menjadi bahan baku (pellet dan sponge iron) untuk industri baja di Indonesia. Pelaku usaha industri besi baja di Koridor Ekonomi Kalimantan didominasi oleh investor swasta dengan nilai investasi yang teridentifikasi hingga tahun 2015 sebesar IDR 40 Triliun.

Sejak tahun 2004, permintaan besi baja terus mengalami peningkatan yang didorong oleh adanya peningkatan permintaan di berbagai industri lain, seperti elektronik, infrastruktur, dan otomotif. Walau demikian, tingkat konsumsi baja per kapita di Indonesia saat ini sebesar 37,3 Kg/Kapita per tahun masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Saat ini Indonesia hanya memiliki sangat sedikit industri pengolahan bijih besi, padahal Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan yang potensial. Indonesia menempati peringkat ke-36 dunia sebagai negara produsen baja dengan kisaran produksi 3,5-4,2 juta Ton per tahun. Sementara itu, konsumsi baja di Indonesia, walaupun masih tergolong rendah di negara-negara Asia Tenggara, mencapai kisaran 6,9 sampai 8,5 juta Ton. Defisit kebutuhan baja masih dipenuhi melalui impor baja berupa pellet atau pig iron

Gambar 3.D.22
Produksi dan Konsumsi Baja di Indonesia

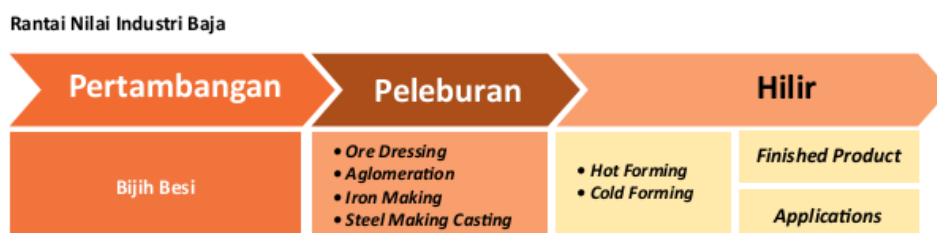


Sumber: The Indonesia Iron & Steel Industry Association, 2012

Tingginya angka ekspor bijih besi dan banyaknya kegiatan penambangan liar yang mengabaikan *good mining practice* juga merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi. Sejak tahun 2006, volume ekspor bijih besi jauh lebih besar dari impor, namun hingga kini neraca perdagangan bijih besi masih defisit. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor saat ini masih mengabaikan peningkatan nilai tambah. Sejak 1995 konsumsi baja di Indonesia di atas produksi nasional meskipun mengalami tren penurunan konsumsi akibat krisis ekonomi pada tahun 1998-1999. Seiring membaiknya ekonomi Indonesia konsumsi baja Indonesia terus mengalami peningkatan hingga 2011. Namun, hal ini belum diimbangi dengan kapasitas produksi nasional sehingga pemenuhan kebutuhan baja dipenuhi dengan impor. Maka, tidak heran apabila neraca perdagangan bijih besi mengalami defisit sejak tahun 1995. Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu ada strategi yang mendorong peningkatan nilai tambah besi baja, khususnya untuk pemenuhan konsumsi baja nasional.

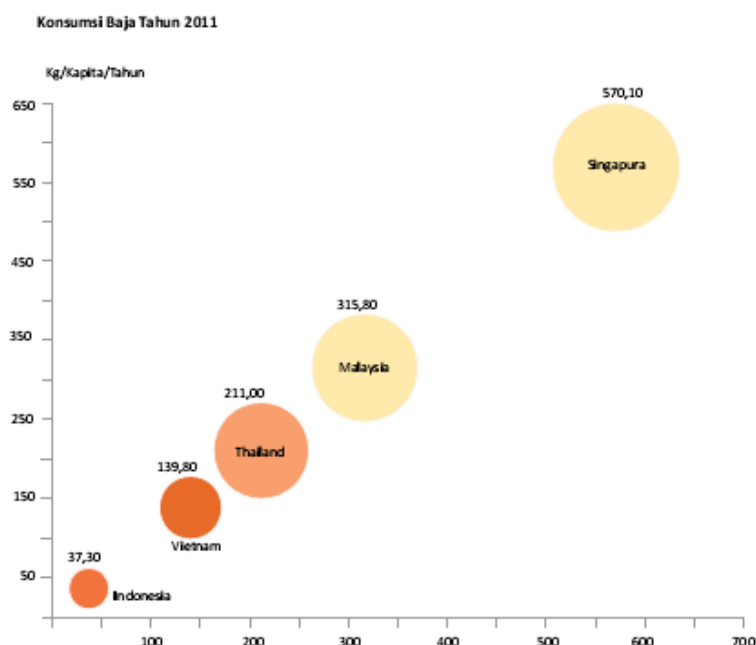
Salah satu strategi pengembangan industri besi baja nasional adalah dengan mendorong terciptanya sinergi dan keterkaitan pada semua mata rantai dalam industri hulu sampai industri hilir baja. Berikut adalah rantai nilai industri baja.

Gambar 3.D.23
Rantai Nilai Industri Baja



Industri hulu dalam mata rantai industri besi baja adalah pertambangan bijih besi, sedangkan industri hilirnya adalah industri baja *finished flat product* dan industri baja *finished long product*. Sinergi industri hulu dan hilir baja dapat dilakukan dengan memfasilitasi kemitraan antara industri hulu dan hilir untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir dan mendorong peningkatan penggunaan baja produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri pertahanan.

Gambar 3.D.24
Konsumsi Baja Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura



Sumber: Laporan Kajian Industri Prioritas, BKBM



- 168 -

Saat ini di Indonesia masih ada beberapa bagian dari rantai nilai industri baja yang belum tersedia. Dengan demikian, investasi pada industri besi baja akan berfokus pada pengembangan industri antara melalui pengembangan industri pengolahan atau benefisi industri besi dan baja. Upaya ini dapat pula memberikan implikasi positif guna pengoptimalan potensi peningkatan nilai tambah industri hulu di dalam negeri dalam rangka program perkuatan revitalisasi baja nasional.

1) Regulasi dan Kebijakan

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja di Kalimantan memerlukan penataan regulasi dan dukungan kebijakan berikut:

- a) Penyelesaian kebijakan industri (blue print) industri baja (yang menunjukkan sinergitas dan keterkaitan pada semua mata rantai dalam industri hulu sampai industri hilir baja) dan pengembangan industri baja agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri (*self-sufficient steel industry*);
- b) Penertiban kegiatan penambangan liar agar neraca perdagangan bijih besi tidak defisit walaupun sejak tahun 2006 volume ekspor bijih besi jauh lebih besar dari impor;
- c) Penetapan bea keluar bijih besi yang tinggi dalam rangka pembatasan ekspor bahan mentah juga perlu diterapkan agar permintaan nasional dapat terpenuhi.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk peningkatan konektivitas dalam pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja sebagai berikut:

- a) Penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jaringan jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan di kawasan industri besi baja di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- b) Peningkatan kelas dan kapasitas pelabuhan laut yang mendukung pengembangan bijih besi di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- c) Perbaikan jalan-jalan akses untuk melancarkan distribusi hasil industri bijih besi di lokasi kawasan industri besi baja maupun antar lokus kegiatan terkait di Koridor Ekonomi Kalimantan.

3) SDM dan IPTEK

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja di Kalimantan memerlukan dukungan pengembangan SDM dan IPTEK sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

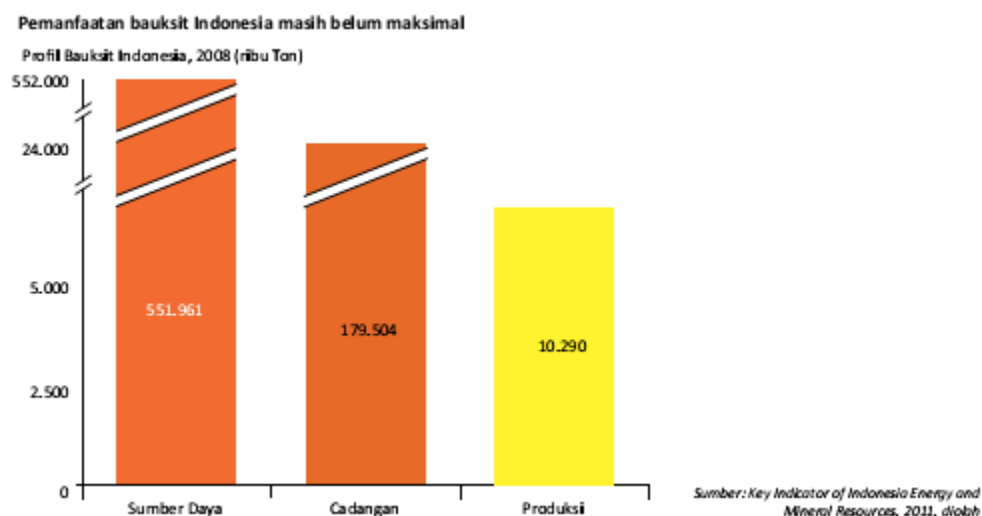
- 169 -

- a) Mendorong penggunaan teknologi eksplorasi non-destruktif yang tepat, akurat, serta efisien untuk dapat mengidentifikasi potensi bijih besi dalam suatu wilayah;
- b) Pengembangan teknologi yang dapat mengolah bijih besi kadar rendah dan atau lateritik untuk dapat menghasilkan bahan baku dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh industri baja dapat dilakukan dengan bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- c) Memberikan bantuan pembelajaran perakitan peralatan CNC Lathe, serta bantuan pembelajaran perakitan peralatan welding, drilling, bending, dan cutting di SMK;
- d) Mendorong penggunaan teknologi tinggi yang mampu mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan produk yang berkualitas baik, seperti membuat pelatihan peningkatan nilai tambah bijih bauksit, peningkatan nilai tambah bijih besi, dan peningkatan nilai tambah bijih zircon;
- e) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja pada beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan.

e. Bauksit

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai penyimpan cadangan bauksit terbesar nomor tujuh di dunia sekaligus menjadi produsen bauksit nomor empat di dunia. Besarnya cadangan bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta Ton, dimana 85 persen cadangan bauksit berada di Kalimantan Barat dan sekitar 15 persen berada di Kepulauan Riau.

Gambar 3.D.25
Profil Bauksit Indonesia



Cadangan bauksit terbesar Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sekitar 3,29 miliar Ton dengan luas wilayah yang memiliki IUP seluas 557.259 Ha. Namun, hingga saat ini mayoritas hasil tambang bauksit diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu mengembangkan industri pengolahan bauksit menjadi alumina. Selain untuk menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai optimalisasi nilai tambah bahan baku mineral, harga jual alumina yang bisa mencapai 10 kali harga jual bauksit dan tingginya angka impor alumina merupakan alasan mengapa industri pengolahan bauksit menjadi alumina perlu dikembangkan di Kalimantan.

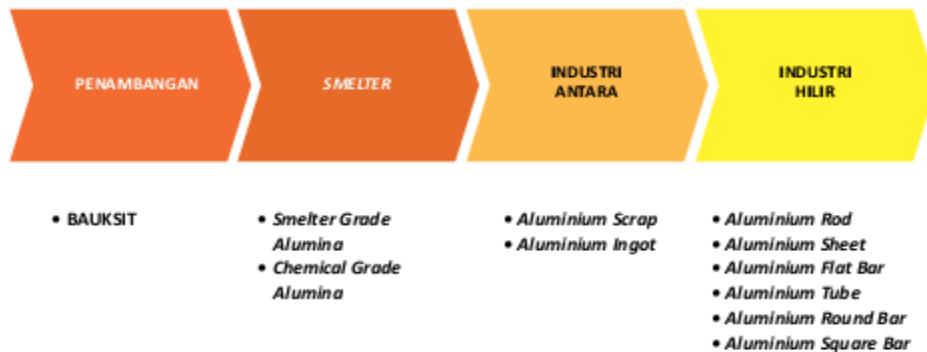
Di masa yang akan datang, untuk mendukung penciptaan nilai tambah di dalam negeri, pengembangan industri aluminium terpadu yang mengkombinasikan industri alumina berbahan baku lokal (*Smelter Grade Alumina*), industri aluminium smelter (*aluminium ingot primer dan molten aluminium*), industri aluminium antara (*aluminium die casting*), dan industri aluminium hilir yang belum tersedia di Indonesia (*aluminium berbasis aluminium cair, aluminium pigment, dan aluminium powder*) sangat dibutuhkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Rantai Nilai Industri Bauksit



Upaya peningkatan nilai tambah ini memerlukan insentif dari pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, mengingat industri pengolahan bauksit menjadi alumina memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Risiko yang tinggi ini seringkali menyulitkan pelaku usaha dalam mendapatkan sumber dana pembiayaan untuk melakukan investasi dalam industri pengolahan bauksit.

Rencana investasi industri bauksit pada pengolahan bauksit menjadi alumina yang akan dilakukan di Kalimantan dengan sentra produksi di KPI Mempawah, Ketapang, dan Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Investasi pada industri bauksit didominasi oleh investor swasta dengan nilai investasi mencapai IDR 21.720 Miliar.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk mencapai produktivitas bauksit yang optimal, diperlukan upaya-upaya perbaikan regulasi ataupun kebijakan. Berikut beberapa kebijakan atau regulasi yang telah dan perlu diperbaiki, untuk mendukung hilirisasi bauksit:

- a) Perbaikan Peraturan Presiden Nomor. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait dengan percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI;
- b) Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan, serta penyelarasan antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c) Perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu. Substansi yang mengalami perubahan mengenai penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak penghasilan badan (Pasal 31A UU PPh);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- d) Perbaiki Peraturan Pemerintah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perlunya pengaturan mengenai pemindahan IUP dari perusahaan induk kepada anak perusahaan;
- e) Perbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Substansi yang mengalami perubahan terkait “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
- f) Perbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Substansi yang mengalami perubahan terkait “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan;
- g) Perbaiki Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/ 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Substansi yang mengalami perbaikan terkait pengaturan mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) untuk mendorong investasi dan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;
- h) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
- i) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
- j) Perbaiki standar operasi yang mengatur mekanisme perizinan, agar praktik pungutan liar yang masih menjadi masalah klasik terkendalanya pengembangan kegiatan ekonomi utama bauksit/alumina dapat dikurangi atau dihilangkan;
- k) Pemberian jaminan kepastian hukum dan pembebasan investor dari praktik-praktik pungutan liar, terutama dibutuhkan bagi investor yang sudah menerapkan *good mining practice*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan investasi Kegiatan Ekonomi Utama Bauksit di Kalimantan membutuhkan dukungan berupa infrastruktur, antara lain pelabuhan dan jalan akses menuju pelabuhan, jalan akses atau conveyor belt yang menghubungkan area tambang dengan pabrik, serta pembangkit listrik. Berikut beberapa daftar infrastruktur yang masuk dalam daftar MP3EI, yaitu:

- a) Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan dan pembangkit listrik untuk beberapa ruas dan gardu induk di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- b) Pembangunan pelabuhan, jalan akses, dan jalan strategis nasional yang dapat mendukung industri bauksit di Koridor Ekonomi Kalimantan.

3) SDM dan IPTEK

Untuk mendukung terciptanya kemandirian produksi dan pengolahan bauksit di Indonesia, khususnya di Kalimantan dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a) Mendirikan pusat desain dan rekayasa teknologi aluminium;
- b) Pengembangan pendidikan dan transfer teknologi pada institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan keahlian teknis dalam bidang industri ini;
- c) Menyediakan kebutuhan tenaga SMK untuk mendukung pengembangan SDM di Kegiatan Ekonomi Utama Bauksit;
- d) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Utama Bauksit di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan.

f. Perakayuan

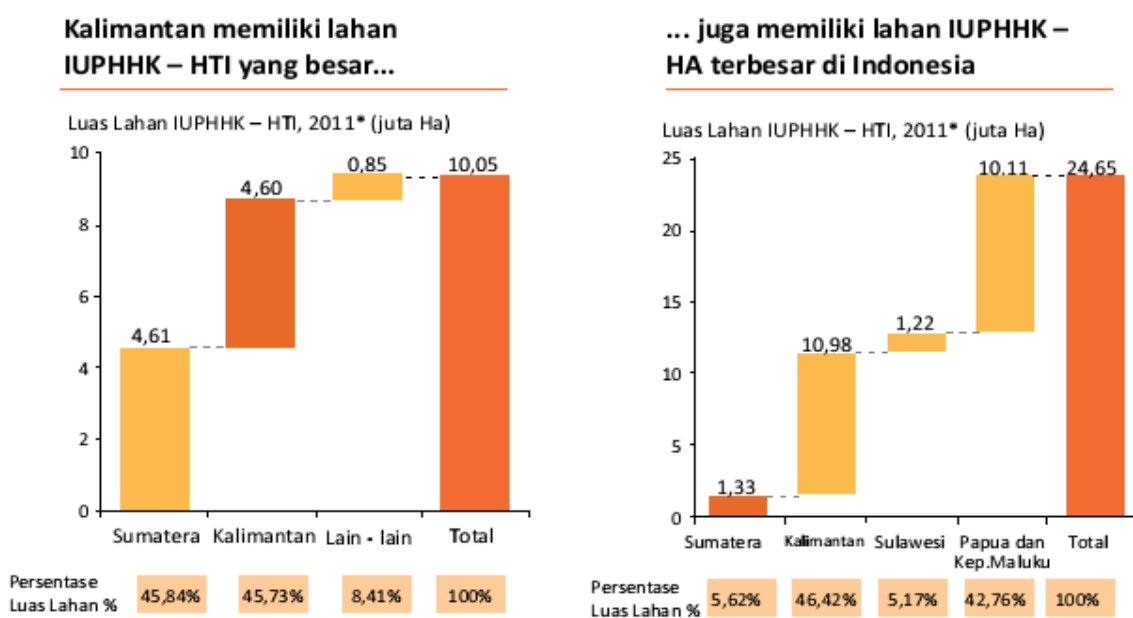
Dalam perekonomian nasional, sejak tahun 2005 hingga 2011, sektor kehutanan memberi kontribusi antara 0,7 persen – 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional atau dengan total produksi pada tahun 2011 mencapai IDR 36,1 Triliun di tahun 2007 dan IDR 51,78 Triliun di tahun 2011 (BPS, 2011).

Koridor Ekonomi Kalimantan merupakan salah satu paru-paru utama dunia terkait dengan masih luasnya area hutan yang terkandung di dalamnya. Pulau Kalimantan tercatat memiliki kawasan hutan terluas kedua setelah Pulau Papua dengan luas kawasan hutan masing-masing sebesar 41 juta Ha dan 42 juta Ha.

Namun dari segi luas kawasan Hutan Produksi, Kalimantan merupakan pulau dengan luas kawasan Hutan Produksi tertinggi (29,8 juta Ha), dan baru sekitar 52,7 persen (15,7 juta Ha) yang sudah dimanfaatkan sebagai hutan produksi (Kementerian Kehutanan, 2009). Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, Kalimantan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) – Hutan Tanaman Industri (HTI) dan IUPHHK– Hutan Alam (HA) yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar bagi pengembangan investasi di industri perkebunan, sebagai industri utama di sektor kehutanan.

Gambar 3.D.27

Luas Lahan Hutan Kalimantan

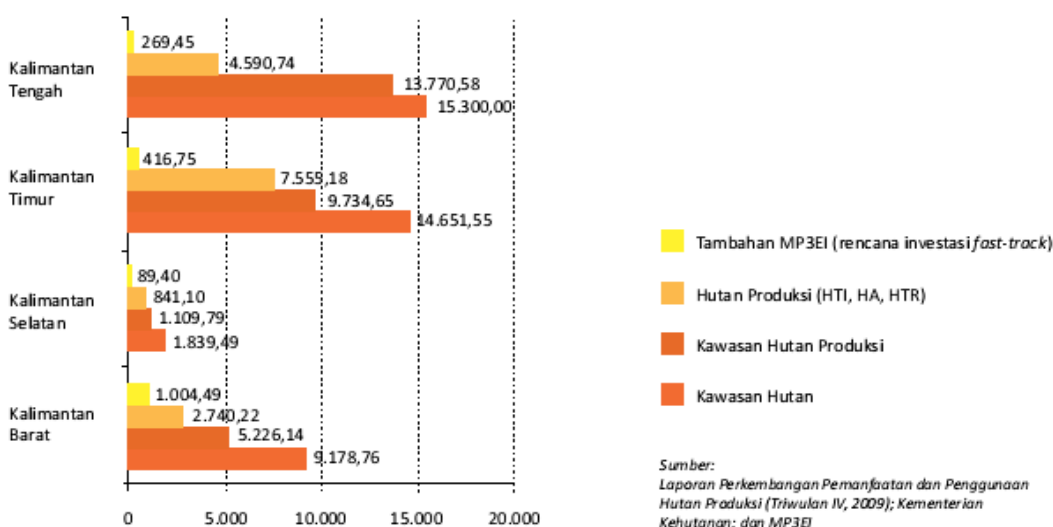


Sumber :
Statistik Kehutanan Indonesia 2011, diolah

Sektor kehutanan sendiri secara umum masih menyimpan potensi lain (non-kayu) yang belum dioptimalkan pengelolaannya, seperti potensi buah-buahan, rotan, bambu, lebah, sutera, gaharu, dan tentu dapat berfungsi sebagai penyerap karbon yang terkemas dalam skema internasional *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+).

Gambar 3.D.28
Sebaran Kawasan Hutan Pada Masing-Masing
Provinsi Kalimantan

Sebaran Kawasan Hutan Produksi di Masing-Masing Provinsi di Kalimantan (ribu Hektar)



Gambar di atas menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan industri perkebunan berdasarkan luasnya kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Alam (HA) yang belum dimanfaatkan potensi nilai ekonominya. Hal ini juga tercermin pada stagnannya kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, walaupun secara nominal terdapat peningkatan volume output pada sektor kehutanan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dalam perekonomian Indonesia.

Untuk mendorong industri perkebunan sebagai bagian dari sektor kehutanan, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam industri perkebunan Indonesia. Produksi kayu bulat sudah harus difokuskan melalui hutan tanaman (baik Hutan Tanaman Industri maupun Hutan Tanaman Rakyat), sementara pemanfaatan Hutan Alam produktif dapat lebih diarahkan untuk pemanfaatan potensi non-kayu hutan.

Pengembangan hutan tanaman dipandang perlu bukan hanya karena cadangan hutan alam produktif semakin menipis, tapi juga karena pengembangan Hutan Tanaman dapat memproduktifkan kembali kawasan Hutan Alam produktif yang telah rusak. Selain itu, hutan tanaman dapat menyediakan bahan baku kayu bulat dengan harga yang lebih murah daripada kayu bulat dari hutan alam sehingga Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat menjadi lebih kompetitif.

Hal yang tidak kalah penting untuk mendorong optimalisasi kontribusi sektor kehutanan adalah peningkatan produktivitas hutan tanaman melalui pengembangan dan perluasan aplikasi teknik penanaman yang efisien. Rencana investasi di industri perकayuan untuk jangka pendek dan menengah (rencana investasi fast track MP3EI) di Pulau Kalimantan telah tercatat berupa investasi HTI dan IPHHK. Rencana investasi HTI terluas tersebar di beberapa KPI di Kalimantan Barat (1.004.493 Ha, nilai investasi sekitar IDR 9.600 Miliar), diikuti oleh Kalimantan Timur (416.748 Ha, nilai investasi sekitar IDR 7.200 Miliar), Kalimantan Tengah (269.446 Ha, nilai investasi sekitar IDR 5.400 Miliar), dan Kalimantan Selatan (89.400 Ha, nilai investasi sekitar IDR 1.300 Miliar). Untuk rencana investasi di IPHHK tercatat masih terpusat di Kalimantan Timur dengan rencana investasi sekitar IDR 7.800 Miliar dan di Kalimantan Tengah yang mencatat rencana investasi sebesar IDR 893 Miliar.

Gambar 3.D.29

Rantai Nilai Industri Perकayuan (yang tercakup dalam Sektor Kehutanan)



Turut tercatat beberapa tantangan yang masih merintangی usaha pengembangan industri perकayuan (HTI dan IPHHK) antara lain:

- 1) Tantangan dalam pengembangan HTI utamanya terletak pada sempitnya ruang gerak pengusaha HTI dalam memasarkan kayu bulatnya. Keran ekspor kayu bulat saat ini telah ditutup, sementara struktur pasar domestik cenderung masih bersifat monopsoni (dikuasai oleh beberapa pemain utama). Kedua hal tersebut kemudian menyebabkan rendahnya daya tawar pengusaha HTI dalam proses penentuan harga jual domestik. Saat ini terjadi selisih signifikan antara harga kayu bulat domestik dan internasional (harga domestik lebih rendah sekitar 30 persen – 40 persen);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

- 2) Sementara tantangan dalam pengembangan IPHHK, khususnya IPHHK dari investasi dalam negeri, adalah masih rendahnya animo perbankan untuk memberikan dukungan pembiayaan, baik untuk keperluan revitalisasi mesin-mesin yang sudah tua, maupun untuk pengembangan IPHHK baru.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut di atas, diperlukan dukungan kebijakan berikut:

- a) Pengembangan industri perikanan harus dilakukan melalui pengembangan investasi di HTI dan IPHHK secara simultan, bukan sekuensial;
- b) Paradigma pada pengembangan investasi IPHHK tidak boleh bersifat sempit yang hanya fokus pada peningkatan investasi tertanam, melainkan bersifat luas dimana peningkatan investasi harus disertai dengan peningkatan jumlah pemain guna menyeimbangkan kekuatan tawar-menawar di pasar kayu bulat, khususnya jika pembukaan kembali keran ekspor kayu bulat bukan pilihan yang tersedia;
- c) Sektor perbankan perlu didorong untuk turut mendukung pengembangan investasi di IPHHK dengan sosialisasi tingkat keuntungan dan karakteristik risiko pada investasi IPHHK;
- d) Perbaikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, substansi yang mengalami perbaikan, yaitu penyeimbangan dan penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi), dan area penggunaan lain.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Dukungan infrastruktur (enabler) yang diperlukan untuk peningkatan konektivitas bagi pengembangan kegiatan ekonomi utama Perikanan di Koridor Ekonomi Kalimantan meliputi:

- a) Pembangunan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan untuk pengangkutan hasil pengolahan kayu di Koridor Kalimantan, salah satunya peningkatan Pelabuhan Trisakti;



- 178 -

- b) Pembangunan jalan dan jembatan untuk akses distribusi hasil industri pengolahan kayu:
 - Peningkatan Jalan Strategis Nasional;
 - Pembangunan Jembatan Tayan;
 - Jalan akses TPK Palaran - Samarinda (jalan strategis nasional).
- c) Pembangunan pembangkit listrik sebagai dukungan kebutuhan energi, meliputi pembangunan PLTU, fasilitas transmisi kelistrikan dan PLTGU yang tersebar di lokasi industri perikanan di Koridor Ekonomi Kalimantan.

3) SDM dan IPTEK

Untuk mengembangkan sektor perikanan, dukungan SDM Iptek yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan kebutuhan siswa pendidikan menengah kejuruan kehutanan dan memberikan bantuan pembelajaran perakitan peralatan mesin pengolah kayu bagi SMK;
- b) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung sektor Perikanan di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan;
- c) Membuat pelatihan peningkatan mutu dan desain ekspor serta kemasan dalam rangka mendorong ekspor produk handicraft;
- d) Mengadakan berbagai macam diklat dalam rangka memberikan pengetahuan akan pengelolaan hutan, dasar-dasar konservasi sumber daya alam, serta upaya pencegahan dan penanganan bencana (kebakaran hutan);
- e) Mendirikan community college, melakukan penguatan Politeknik Balikpapan, serta menyediakan supervisor ahli pengelolaan tanaman untuk meningkatkan kualitas SDM.

g. Kegiatan Ekonomi Lain

Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Kalimantan di atas, koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan seperti Karet, Pertanian Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata yang difokuskan pada 7 Destinasi Pariwisata Nasional.

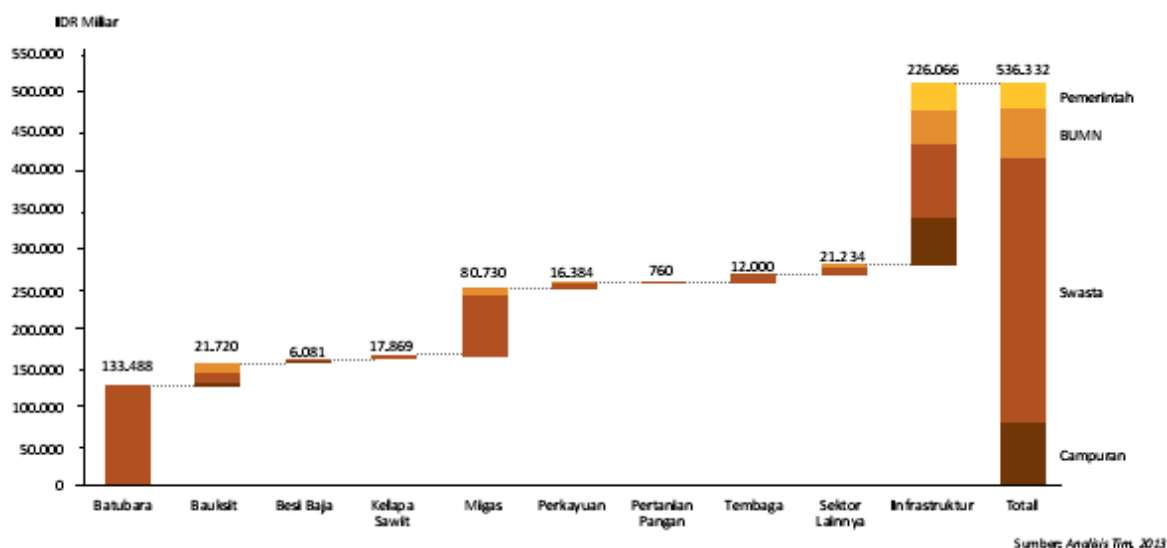
2. Investasi

Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan teridentifikasi rencana investasi untuk Kegiatan Ekonomi Utama Migas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan, dan Infrastruktur pendukung sebesar IDR 536.332 Miliar.

Berikut ini adalah gambaran umum rencana investasi kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur yang terdapat di Kalimantan:

Gambar 3.D.30

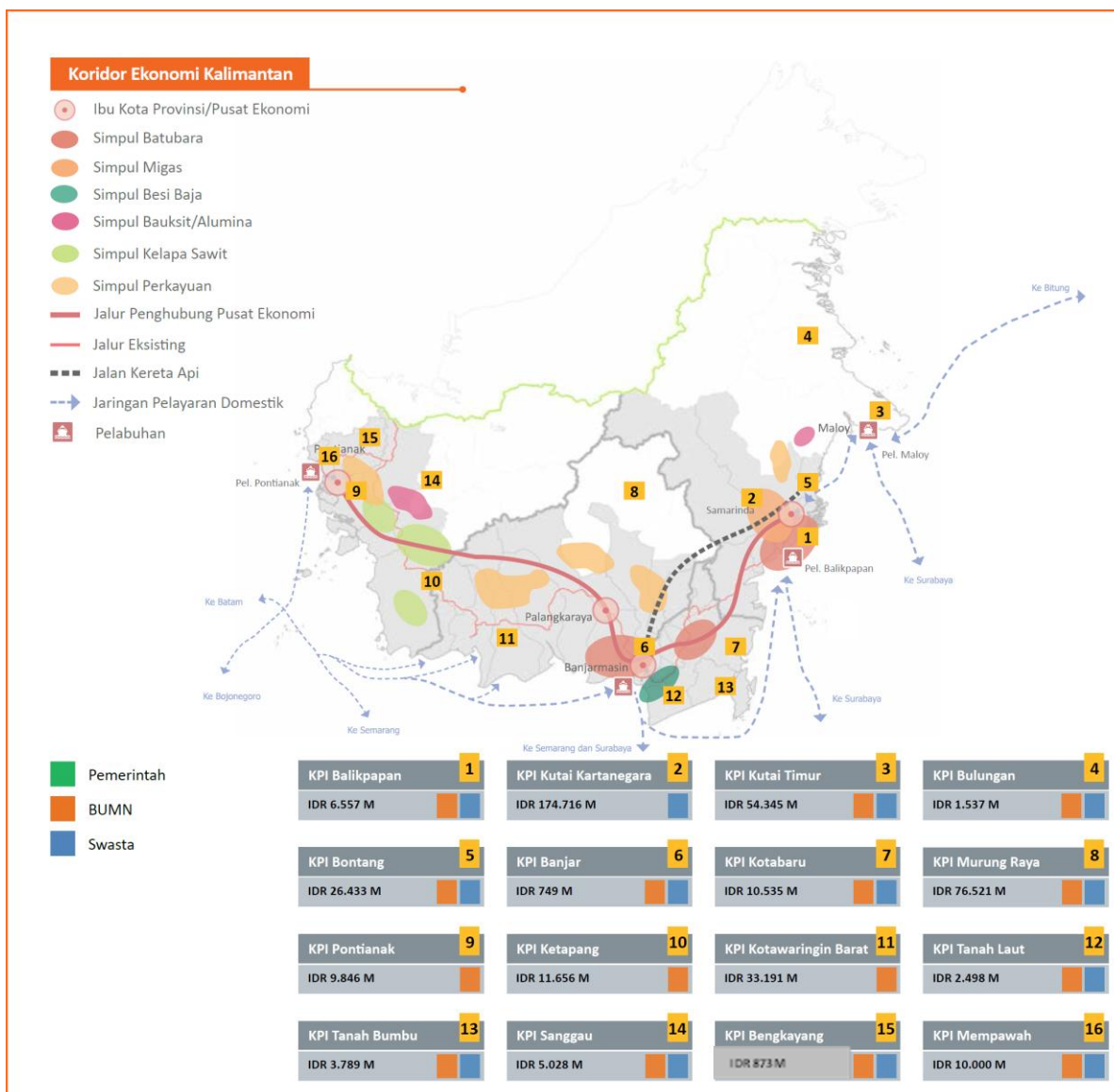
Indikasi Nilai Investasi di Koridor Ekonomi Kalimantan



Disamping investasi diatas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Kalimantan, tetapi menjadi bagian dari 22 Kegiatan Ekonomi Utama seperti Tembaga, Karet, Pertanian Pangan, Perikanan, dan Peternakan dengan jumlah investasi sebesar IDR 12.760 Miliar. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan diluar 22 Kegiatan Ekonomi Utama yang dikembangkan di MP3EI seperti petrokimia, bahan peledak, mangan, dan barang konsumsi sebesar IDR 21.234 Miliar.

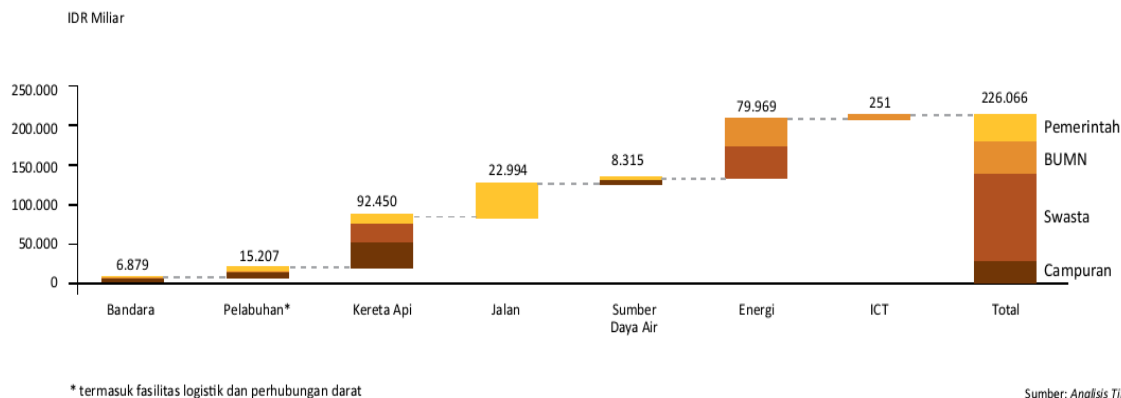
Gambar 3.D.31

Peta Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Prioritas Koridor Ekonomi Kalimantan



Gambar 3.D.32

Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN dan Campuran



Dalam jangka panjang, pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama difokuskan untuk membangun industri hilir Kegiatan Ekonomi Utama, didukung dengan penguatan teknologi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Selain itu, sektor jasa juga perlu dikembangkan untuk menggantikan kegiatan ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan di Koridor Ekonomi Kalimantan. Selain itu, inisiatif yang ditawarkan di Koridor Ekonomi Kalimantan dapat berupa penciptaan dan pengembangan aglomerasi industri yang didukung oleh pengadaan infrastruktur pendukung seperti tenaga listrik, air bersih, dan pengolahan limbah. Pusat kegiatan ekonomi utama dalam struktur tata ruang.

Kalimantan dihubungkan melalui jaringan jalan raya dan jalur rel kereta api trans Kalimantan yang terintegrasi dengan angkutan sungai. Pola pengembangan industri hilir kegiatan ekonomi pertambangan, pertanian, dan perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan kluster industri hilirnya dikembangkan di sepanjang sungai. Hal ini dilakukan untuk efisiensi pengadaan prasarana perhubungan darat. Sesuai dengan sumber daya alam dan kondisi geografis Pulau Kalimantan, Koridor Ekonomi Kalimantan mempunyai tema pembangunan atau aktivitas utama pembangunan sebagai hasil tambang dan lumbung energi nasional. Seluruh upaya pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan ini dibangun dengan kesadaran penuh untuk tetap melestarikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Sinergi antara kegiatan pertambangan dan kehutanan ini dapat dilakukan melalui good mining practice pada saat eksplorasi dan kegiatan pasca tambang.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perluasan ekonomi di Koridor Ekonomi Kalimantan, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha para pelaku sektor. Beberapa perubahan dan harmonisasi regulasi terkait pertambangan, perkebunan, kehutanan, lingkungan, serta tata ruang dilakukan guna meminimalisasi hambatan-hambatan yang bersifat kontra produktif terhadap optimalisasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan nilai tambah produk yang akan diekspor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Dalam pengembangan jaringan infrastruktur, di Kalimantan terdapat model pengembangan infrastruktur konsorsium, dimana beberapa perusahaan kegiatan ekonomi utama batubara (*conveyor belt*, rel kereta api, dan jalan yang sama) saling berbagi infrastruktur sehingga dapat meningkatkan efisiensi.